

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ITLOS memiliki kewenangan yang telah dibagi sesuai dengan tugas dan kewajiban tiap *Chamber*. Dalam struktur ITLOS, ITLOS dibagi menjadi 5 *Chambers* dalam memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan kewenangannya tersebut. *Chamber/Chamber* tersebut adalah *Chamber* untuk Sengketa Dasar Laut, *Chamber* Untuk Prosedur Sumir, *Chamber* untuk Sengketa Perikanan, *Chamber* untuk Sengketa Delimitasi Maritim, *Chamber* untuk Sengketa Lingkungan Laut dan *Chamber* untuk Sengketa yang diatur dalam Pasal 15 Paragraf 2 dalam Statuta ITLOS.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut di ITLOS dimulai dari Proses Pendaftaran Kasus ke Panitera, Proses sebelum pengadilan yang terbagi menjadi Prosedur Institusi, Prosedur Tertulis, Musyawarah Awal, Prosedur Lisan hingga Proses pemeriksaannya suatu kasus dalam pengadilan yang terbagi menjadi Penetapan Sementara, Prosedur Pemeriksaan Awal, Keberatan Awal, Klaim-Kontra, Intervensi, Penghentian dan Putusan Akhir merupakan produk/hasil dari suatu proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan ITLOS.
3. Bentuk dan Sifat Putusan ITLOS bersifat *final and binding* artinya putusan atau hasil akhir ITLOS adalah mengikat para pihak dan para pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh ITLOS. Dalam proses pemeriksaan perkara, ITLOS dapat mengeluarkan semacam putusan

yang bersifat sementara sambil menunggu putusan akhir keluar, putusan yang bersifat sementara itu berupa Tindakan Sementara (Provisional Measures) dan Pelepasan Segera (Prompt Release). Tindakan ini dikeluarkan ITLOS apabila ada peristiwa yang akan terjadi dan tidak dapat ditahan akibatnya seperti halnya pencemaran dan lain-lain.

B. Saran

1. Struktur ITLOS berdasarkan kewenangan memeriksa dan memutus perkara menurut penulis sudah cukup mumpuni. Namun, dalam Statuta ITLOS terkait dengan bagaimana suatu sengketa masuk hingga dibentuknya hakim untuk *Chamber* terkait dengan sengketa tersebut tidak jelas, dalam artian tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana tiap-tiap *Chamber* bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain *Rules of Tribunal*, ITLOS perlu membuat suatu aturan yang isinya khusus membahas bagaimana tiap-tiap *Chamber* yang telah dibentuk dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan sehingga terciptanya koordinasi yang kuat antara tiap-tiap *Chamber* dengan Presiden ITLOS dengan struktur-struktur lainnya secara umum.
2. Ada beberapa mekanisme ITLOS yang sangat disayangkan terkesan membuang-buang waktu dan terkesan tidak berguna, salah satunya dalam prosedur pemeriksaan sebelum pengadilan adanya proses yang namanya pemeriksaan secara tertulis dimana dalam prosedur dalam pengadilan (prosedur insidental) juga adanya proses yang namanya pemeriksaan secara lisan, seharusnya 2 proses ini digabung dalam satu prosedur pemeriksaan baik sebelum pengadilan ataupun di dalam pengadilan agar

dapat menghemat waktu dan hal lain-lainnya. Selain itu, menurut penulis sebaiknya penetapan sementara seharusnya dijadikan prosedur paling awal guna untuk melindungi kepentingan daripada pemohon agar sengketa, kapal atau yang lainnya yang terkait dengan sengketa dapat dilindungi sementara selagi sengketa diperiksa dan menjelas diputus oleh hakim. ITLOS perlu “mengiklankan” fungsinya agar negara yang bersengketa dibidang hukum laut dapat menjadikan ITLOS sebagai tujuan utama penyelesaian sengketanya. Dalam hal “sepi pengunjung” ITLOS seharusnya membentuk *Chamber-Chamber* khusus tersebut apabila diperlukan, sehingga ITLOS dapat memaksimalkan fungsinya dibidang lain.

3. Dengan hasil akhir putusan yang bersifat *final and binding* apabila dalam jangka waktu tertentu para pihak tidak mengajukan permintaan penafsiran dan revisi, seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi pihak yang bersengketa untuk membawa sengketanya ke dalam ITLOS agar dapat diperiksa dan diputus. Sejauh ini, putusan yang telah dikeluarkan oleh ITLOS terhadap 4 kasus mengenai pencemaran lingkungan laut belum pernah dilakukan perubahan (*revised*) terhadap putusan Majelis Hakim ITLOS. Terkait dengan Putusan ITLOS yang bersifat *Final and Binding* seharusnya ITLOS tidak memberi ruang bagi para pihak untuk mengajukan perubahan (*revised*) setelah putusan dibacakan di muka Pengadilan pada hari putusan itu dibacakan yang mengakibatkan putusan itu seketika memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Namun, mengenai tindakan yang dapat dilakukan ITLOS sebelum putusan akhir

keluar, seperti halnya memberatkan pihak pemohon yang meminta tindakan itu, seharusnya setiap kasus yang telah dimasukkan ke dalam ITLOS harus disertai dengan dokumen apakah kasus ini menyangkut kapal dan awak kapal dan atau menyangkut peristiwa yang akibatnya tidak dapat tertahankan apabila tidak diambil tindakan secepatnya. Oleh karena itu, ITLOS seharusnya mewajibkan pihak pemohon agar menyertakan dokumen tersebut agar sebelum persidangan dimulai, Pengadilan telah mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dapat berubah menjadi masalah besar apabila dibiarkan begitu saja.

